

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Studi Kepustakaan

Dalam upaya memecahkan masalah penelitian ini, maka penulis mencoba mengemukakan dan menindak pada teori yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Sehingga dalam hal tersebut diharapkan dapat memberikan dasar dan arahan bagi penelitian yang dilakukan.

1. Konsep Administrasi dan Administrasi Publik

Administrasi adalah kumpulan orang yang di dalamnya terdapat sistem kerja sama, sistem hubungan atau sistem sosial yang kesemuanya itu baru bisa berjalan apabila ada manusia sebagai penggerak utama dalam suatu organisasi.

Menurut Siagian (2006:2) administrasi merupakan keseluruhan proses kerja sama antara dua orang atau lebih yang didasarkan oleh rasionalitas tertentu dalam rangka mencapai tujuan yang ditentukan sebelumnya.

Menurut Siagian (1992: 2) yang memberi batasan administrasi proses kerja sama antara dua orang atau lebih yang dilaksanakan oleh rasionalisasi tertentu dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan memanfaatkan sarana dan prasarana tertentu secara budaya guna dan berhasil guna (dalam Zulkifli :2005: 9).

Dengan demikian administrasi sebagai ilmu pengetahuan yang bermanfaat apabila konsep-konsep, prinsip-prinsip, rumus-rumus dan lokus fokusnya yang dikembangkan secara terus menerus oleh seorang manusia untuk meningkatkan

kegiatan dalam organisasi maupun administrasi untuk mencapai tujuan dan memegang peranan administrasi yang di harapkan.

Menurut (Darwis dkk, 2009 : 12) mengatakan bahwa administrasi Negara merupakan semua kegiatan dan tingatan yang dilakukan untuk mengatur urusan-urusan Negara yang menyangkut kepentingan Negara yang bersangkutan.

Administrasi publik atau administrasi negara adalah batasan ilmu sosial yang mempelajari tiga elemen penting yang mempelajari kehidupan bernegara yang meliputi lembaga legislatif, yudikatif dan eksekutif serta hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan yang meliputi kebijakan publik, manajemen publik, administrasi pembangunan, tujuan negara dan etika yang mengatur penyelenggaraan negara.

Secara sederhana administrasi publik adalah ilmu yang mempelajari bagaimana pengelolaan suatu organisasi publik seperti departemen-departemen dan dinas-dinas mulai tingkat kecamatan hingga tingkat pusat.

Menurut Chander dan Plano (dalam Pasolong, 2007: 7) mengatakan bahwa Administrasi publik adalah proses dimana sumber daya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk :

- a. Memformulasikan
- b. Mengimplementasikan dan
- c. Mengelola (manage) keputusan – keputusan dalam kebijakan publik.

Dalam definisi ini lebih menekankan aspek keterlibatan personil dengan memanfaatkan sumber-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah publik atau pemerintah.

Golembiewski dalam Thoha (2008:18) : “paradigma dalam administrasi hanya dapat dimengerti dalam hubungannya dengan istilah-istilah lokus dan fokusnya”. Golembiewski lebih menegaskan pendapat Henry bahwa memahami administrasi negara melalui pemahaman paradigma akan sampai kepada pengetahuan tentang lokus dan fokus dari bidang yang digeluti, sehingga administrasi negara akan dapat lebih dipahami secara spesifik

2. Konsep Organisasi dan Organisasi Publik

Dalam hal ini seorang pemimpin di tingkat organisasi apapun di tuntutan untuk memiliki kemampuan dan keahlian yang khusus peranan organisasi tertentu sangat penting guna menerapkan kemampuan dan keterampilan seorang administrator. Segala keberhasilan manusia dalam berbagai bidang kehidupan dapat di capai melalui organisasi dan bantuan orang lain. Manusia tidak akan dapat mewujudkan impian, cita-cita dan tujuan hidupnya. Kergantungan pada orang lain inilah yang mendorong manusia untuk selalu dan senantiasa bekerjasama atau berorganisasi, inilah yang menyebabkan maju mundurnya kehidupan manusia, terwujudnya cita-cita manusia tersebut tergantung pada kemampuan untuk mengatur dan mamfaatkan sumber daya yang ada dalam organisasi, termasuk sumber daya manusia yang lebih efesien, efektif dan produktif.

Organisasi adalah sekelompok orang yang bekerjasama dalam stuktur dan koordinasi tertentu dalam pencapaian tujuan tertentu atau dengan bahasa lain, organisasi sebagai sekumpulan orang atau kelompok yang memiliki tujuan

tertentu dan berupaya dalam mewujudkan tujuannya tersebut melalui kerjasama. (Sule dan Kurniawan saefullah 2004:4).

Menurut Wendrich, et al (dalam Brantas 2009:75) Organisasi adalah proses mendesain kegiatan-kegiatan dalam struktur organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. menurut Sutarto (dalam Brantas 2009:75) Organisasi adalah kumpulan orang, proses pembagian kerja, dan sistem kerja sama atau sistem sosial.

Menurut Hamim (2005:24) organisasi adalah proses penggabungan pekerjaan yang para individu atau kelompok-kelompok, harus melakukan dengan bakat-bakat yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas-tugas sedemikian rupa, member saluran terbaik untu pemakaian efisien, sistematis, positif dari usaha yang tersedia untuk mencapai tujuan organisasi yang ditetapkan

Pengertian organisasi menurut pendapat Siagian (2003:6) organisasi merupakan persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama serta secara formal terkait dalam rangka mencapai suatu tujuan yang telah di tentukan dalam ikatan yang terdapat seorang atau beberapa orang tersebut atasan dan seorang atau kelompok orang yang di sebut bawahan.

Definisi di atas menunjukkan bahwa organisasi dapat di tinjau dari dua segi pandang yaitu :

1. Organisasi sebagai wadah dimana kegiatan-kegiatan administrasi di laksanakan.
2. Organisasi sebagai rangkai hirarki dan interaksi antara orang-orang dalam suatu ikatan formal.

Menurut G.R Terry organisasi berasal dari kata (organism) yaitu struktur dengan bagian yang demikian di integrasi hingga hubungan mereka satu sama lain di pengaruhi oleh hubungan mereka dengan keseluruhan hubungan mereka jadi sebuah organisasi terdiri dari dua bagian pokok yaitu bagian-bagian dan hubungan yang saling ketergantungan antara satu sama yang lainnya (dalam Zulkifli 2005:14).

Organisasi publik dikembangkan dari teori organisasi, oleh karena itu untuk memahami organisasi publik dapat ditinjau dari sudut pandang teori organisasi. Menurut Fahmi (2013:1) organisasi publik merupakan sebuah wadah yang memiliki multi peran dan didirikan dengan tujuan mampu memberikan serta mewujudkan keinginan berbagai pihak, dan tidak terkecuali kepuasan bagi pemiliknya.

Sedangkan menurut Stephen P. Robbins dalam Fahmi (2013:2), organisasi publik merupakan kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus menerus untuk mencapai tujuan bersama atau sekelompok tujuan. Pengertian organisasi publik berkenaan dengan proses pengorganisasian.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa organisasi publik adalah salah suatu wadah yang menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik, dilandasi dengan pengaturan hukum yang mendukungnya.

3. Konsep Manajemen dan Manajemen Publik

Manajemen berasal dari kata (*to manage*) yang berarti menangani, pengendalian, menguasai, mengurus, menyelesaikan sesuatu, manager adalah seorang yang di serah tugas memimpin atau mengurus suatu tugas, lembaga sah dan sebagainya manajemen juga sebagai ilmu dan seni kemudian manajemen proses khas yang menggerakkan suatu organisasi karena tanpa manajemen yang efektif tidak akan ada usaha yang akan berhasil cukup lama. Tercapainya tujuan organisasi baik tujuan ekonomis sosial dan politik. Untuk sebagian besar tergantung kepada komponen para manajer organisasi yang bersangkutan. Manajemen memberikan efektifitas pada usaha manusia.

Menurut Terry (1986:2) manajemen merupakan suatu proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya yang lainnya.

Menurut James A.F Stoner dan Charles Wankel (1986: 4) memberi batasan manajemen adalah proses perencanaan pengorganisasian dan pengendalian upaya organisasi dan menggunakan seluruh sumber daya organisasi lain nya demi tercapainya tujuan organisasi (dalam Siswanto 2005;98).

Menurut Stoner dan Wankel bahwa proses adalah cara sistematis untuk menjalankan suatu pekerjaan. Dalam batasan manajemen di atas prosesnya meliputi:

1. Perencanaan
2. Pengorganisasian

3. Kepemimpinan
4. Pengendalian

Menurut Fayol (Siagian 2003:84) mengatakan bahwa fungsi administrasi dan manajemen itu ialah :

1. Perencanaan
2. Pengorganisasian
3. Pemberian komando
4. Pengkoordinasian
5. Pengawasan

Kemudian manajemen merupakan suatu proses penyelenggaraan berbagai kegiatan dalam rangka penerapan tujuan dan berbagai kemampuan atau keterampilan orang yang menduduki jabatan manajerial untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan manajerial melalui kegiatan orang lain (Siagian 2003;5).

Manajemen pada hakikatnya berfungsi untuk melaksanakan kegiatan yang perlu di laksanakan dalam rangka pencapaian tujuan dalam batas-batas kebijakan umum yang telah di tentukan pada tingkat administrasi berdasarkan konsep-konsep diatas mengatakan mengatakan bahwa manajemen merupakan suatu kegiatan pengerakan atau menggerakkan orang-orang yang melakukan pekerjaan agar dapat mencapai tujuan secara efektif dalam sebuah organisasi.

Brantas (2009;15) manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang yang kearah tujuan-tujuan organisasional.

Samsudin (2010;15) mengemukakan manajemen yaitu bekerja dengan orang dengan orang-orang mencapai tujuan organisasi dengan pelaksanaan fungsi perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), penyusunan personalia dan kepegawaian (staffing), pengarahan dan kepemimpinan (leading), dan pengawasan (controlling).

Manajemen Publik Menurut Shafritz dan Russel (dalam Kebab, 2008:93) diartikan sebagai upaya seseorang untuk bertanggungjawab dalam menjalankan suatu organisasi, dan pemanfaatan sumber daya (orang dan mesin) guna mencapai tujuan organisasi.

Manajemen publik atau dapat juga disebut manajemen pemerintah secara umum merupakan suatu upaya pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan publik dengan menggunakan sarana dan prasarana yang tersedia. Unsur manajemen saat ini menjadi suatu unsur penting dalam penyelenggaraan organisasi, baik organisasi pada sektor swasta maupun dalam sektor public seperti organisasi pemerintahan. Manajemen pada sektor publik yang diangkat dari manajemen sektor swasta tidak menjadikan orientasi tujuan dan pelaksanaan pada organisasi sektor publik menjadi sama dengan sector swasta.

4. Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM)

Fenomena sosial pada masa kini dan masa depan dalam era globalisasi ini, yang sangat menentukan adalah manajemen sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan modal dan kejayaan yang terpenting dari setiap kegiatan manusia. Manusia adalah sebagai unsur terpenting mutlak, di analisis dan di kembangkan dengan cara tersebut, tenaga dan kemampuan benar-benar dapat di

manfaatkan secara optimal bagi kepentingan organisasi maupun bagi kepentingan individu.

Menurut (Nawawi) sumber daya manusia merupakan potensi yang merupakan aset dan fungsi sebagai modal (non material atau non finansial) di dalam organisasi yang mewujudkan eksistensi organisasi (dalam Sedarmayanti, 2009 : 207)

Jumlah sumber daya yang dimiliki oleh organisasi yang di beri mandat untuk mengimplentasi suatu kebijakan akan mempengaruhi kapasitas organisasi tersebut dalam menjalankan Misi nya, Goggin (dalam Purwanto :2015:149).

Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) Menurut Mary Parker Folett adalah suatu seni untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi melalui pengaturan orang-orang lain untuk melaksanakan berberbagai pekerjaan yang di perlukan atau dengan kata lain tidak melakukan pekerjaan itu sendiri.

Pengertian manajemen sumber daya manusia banyak di di kemukakan oleh para ahli manajemen. Menurut Sedarmayanti (2007;13) menjelaskan bahwa manajemen sumber daya manusia adalah kebijakan dan praktik penentuan aspek manusia atau sumber daya manusia dalam posisi manajemen, termaksud merekrut, menyaring, melatih, memberi penghargaan dan nilai.

Selanjutnya menurut Malayu (2006:10) manajemen sumber daya manusia adalah seni mengatur hubungan dan peran tenaga kerja agar efektif dan efesiensi membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan dan masyarakat.

Menurut Dessler (2006 : 5), defenisi manajemen sumber daya manusia adalah proses memperoleh, melatih, menilai dan memberikan kompensasi kepada karyawan,

memperhatikan hubungan kerja karyawan, kesehatan, keamanan dan masalah keadilan.

5. Konsep Pelaksanaan Tugas

Jika dikaitkan dengan penjelasan Administrasi dan Manajemen, ini berarti bahwa sumber daya manusia berperan penting dan dominan dalam proses administrasi dan manajemen. Karena administrasi merupakan segenap aktivitas kerja pegawai yang bersangkutan dengan penggunaan tenaga kerja secara bersama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sedangkan manajemen sendiri memiliki hubungan dengan mewujudkan hasil tertentu melalui kegiatan orang lain. Dengan demikian dapat diterjemahkan bahwa pelaksanaan kegiatan organisasi merupakan implementasi dari penerapan proses administrasi dan manajemen.

Dari seluruh rangkaian proses manajemen, pelaksanaan merupakan fungsi yang paling mendasar. Dalam fungsi perencanaan dan pengorganisasian lebih banyak berhubungan dengan aspek-aspek abstrak proses manajemen, sedangkan fungsi *actuating* (pelaksanaan) justru lebih menekankan pada kegiatan yang berhubungan langsung dengan orang-orang dalam organisasi.

Van Mantel dan van Horn (dalam Agustino, 2012;139) pelaksanaan adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.

Menurut Terry (1986) pelaksanaan merupakan usaha menggerakkan anggota kelompok sedemikian rupa hingga mereka berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran perusahaan dan sasaran anggota-anggota perusahaan

tersebut, oleh karena para anggota itu juga ingin mencapai sasaran-sasaran tersebut.

Seperti yang dikemukakan oleh Siagian (2006;126) pelaksanaan tugas adalah suatu kegiatan yang diarahkan pada keberhasilan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan yang ada. Jadi, untuk melaksanakan tugas tersebut perlu ada pembinaan dari atasan kepada bawahan.

Menurut Terry (dalam Syafiie 2006;81) Pelaksanaan kerja adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berkenan berusaha untuk mencapai sasaran agar sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha-usaha organisasi.

Berdasarkan pendapat tersebut dapat pula dikatakan bahwa yang dilakukan atau yang dikerjakan oleh pegawai harus mempunyai ukuran pelaksanaan tugas yang jelas sehingga pekerjaan yang dilakukan selalu sesuai dengan penyelesaian yang ditetapkan. Pelaksanaan tugas mempunyai hubungan erat dengan masalah produktivitas karena merupakan indikator dalam menentukan bagaimana untuk mencapai tingkat produktivitas yang tinggi dalam suatu organisasi. Sehubungan dengan hal tersebut maka upaya mengadakan penilaian terhadap pelaksanaan tugas disuatu organisasi merupakan hal penting yang harus dilaksanakan.

Standar pelaksanaan tugas perlu dirumuskan guna dijadikan tolak ukur didalam menjadikan perbandingan antara apa yang telah dilakukan dengan apa yang telah dipercayakan kepada seseorang. Standar bermaksud dapat pula dijadikan sebagai ukuran dalam mengadakan pertanggung jawaban terhadap apa yang telah dilakukan.

Dapat disimpulkan bahwa *actuating* (pelaksanaan) ini merupakan fungsi manajemen yang sangat mendasar setelah adanya manusia dan organisasi, karena jika manusia yang ada didalam organisasi tidak mampu menjalankan roda organisasi maka sama saja seperti sebuah kendaraan tidak bisa dijalankan karena tidak adanya kunci kontak kendaraan tersebut.

6. Konsep Pengawasan

Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang juga mempunyai hubungan yang erat dengan fungsi-fungsi manajemen lainnya terutama dengan fungsi perencanaan. Dengan demikian pengawasan tidak mungkin berjalan dengan baik dengan baik tanpa kegiatan perencanaan, dan rencana tidak akan tercapai secara optimal jika tidak disertai dengan pelaksanaan fungsi pengawasan. Pengawasan dapat dikatakan salah satu fungsi manajer yang bertujuan untuk memperoleh suatu tingkat keterjaminan efektivitas dan efisien pencapaian tujuan organisasi.

Menurut Silalahi (2002:391) Pengawasan adalah kegiatan organisasional untuk mengetahui apakah kinerja aktual sesuai dengan standar dan tujuan organisasional yang diharapkan. Kinerja aktual diketahui dari usaha-usaha optimis pemanfaatan sumber-sumber dan pelaksanaan tugas-tugas, sementara kesesuaian antara kinerja aktual dan tujuan yang diharapkan diketahui dengan membandingkan hasil yang dicapai dengan standar organisasi.

Sedangkan menurut Siagian (2003:112) Pengawasan adalah proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua

pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Batasan Pengawasan sebagai proses dimana manajemen Pengawasan adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar prestasi dengan perencanaan sasarannya guna mendesain sistem informasi umpan balik, membandingkan prestasi kerja dengan standar yang telah ditetapkan lebih dahulu, menentukan apakah ada penyimpangan dan mencatat besar kecilnya penyimpangan ini dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk memastikan, bahwa sumber perusahaan dimanfaatkan secara efektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan perusahaan Robert (dalam Zulkifli, 2014:136)

7. Konsep Pengawasan sekolah (Supervisi)

Pelaksanaan manajemen pendidikan merupakan salah satu aspek pengawasan yang di kenal dengan istilah supervisi manejerial esensinya yaitu adalah kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan terhadap kepala sekolah dan seluruh elemen sekolah lainnya di dalam mengelola, mengadministrasikan dan melaksanakan seluruh aktivitas sekolah, sehingga dapat berjalan dengan efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan sekolah standar pendidikan nasional. Adapun supervisi berkenaan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pengawas bidang akademik oleh pengawas atas guru sebagai sasaran kegiatan pengawasan.(Depdiknas, 2008:7)

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memaksa semua pihak untuk terus mengadakan inovasi-inovasi dalam bidangnya, terlebih-lebih pada pengelola

dan penanggung jawab pendidikan dalam hal ini termasuk pengawas satuan pendidikan yang selanjutnya di sebut dengan pengawas.

Pengawas adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan pendidikan di sekolah dengan melaksanakan penilaian dan pembinaan dari segi teknis pendidikan dan administrasi pada satuan pendidikan pra sekolah, dasar dan menengah. Petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional pengawas sekolah dan angka kreditnya).

Pengawas mempunyai tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh untuk melakukan pengawasan pendidikan di sekolah dengan melaksanakan penilaian dan pembinaan dari segi teknis pendidikan dan administrasi pada satuan pendidikan tertentu dan sekaligus berfungsi sebagai mitra guru dan kepala sekolah, inovator, konselor, motivator, kolaborator, asesor, evaluator dan konsultan.

Pada pendidikan formal fungsi pengawasan di tugaskan pada jabatan pengawas sekolah. Pengawas sekolah adalah tenaga kependidikan yang diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tentunya pengawas memiliki peran dan kontribusi yang penting. Termasuk juga dalam pelaksanaan manajemen mutu terpadu (Herabudin, 2009:73)

Pengawas sekolah merupakan pelaksana teknis fungsional yang di bidang pengawasan akademik dan manajerial pada sejumlah satuan pendidikan yang di tetapkan. Tanggung jawab pengawas sekolah adalah tercpainya mutu pendidikan di sekolah yang di binanya. Sedangkan manajemen mutu terpadu adalah cara

mengelola lembaga pendidikan dengan perbaikan yang di lakukan terus menerus atas jasa, manusia, produk dan lingkungan dalam rangka memenuhi kebutuhan, keinginan dan harapan para pelanggannya, saat ini dan masa yang akan datang (Mantja, 2004:67)

Neagley (dalam wahjosumidjo, 2007:74), Mengemukakan bahwa setiap layanan pada guru-guru yang bertujuan menghasilkan perbaikan instruksional, belajar dan kurikulum dikatakan supervisi

Sedangkan menurut Rifa'i(dalam Nur Aedi, 2014: 1) yang menyatakan bahwa supervisi merupakan pengawasan profesional, sebab hal ini lebih spesifik juga melakukan pengawasan akademik yang mendasar pada kemampuan ilmiah, dan bukan lagi bersifat pendekatan manajemen yang humanistik, tetapi bersifat kemampuan profesional

Supervisi adalah suatu aktivitas pembinaan, melihat, menilik dan mengawasi dari atasan yang di rencanakan untuk membantu para Guru dan pegawai sekolah lainnya dalam melakukan pekerjaan secara efektif agar tercapainya tujuan Pendidikan Menurut Ngalim Purwanto (dalam Daryanto, 2013:171)

Menurut Nadhirin (2009: 72), fungsi supervisi yaitu sebagai upaya yang dilakukan oleh supervisor dalam rangka membina para guru agar kualitas proses pembelajaran dan hasilnya meningkat, serta mengupayakan agar guru lebih meningkatkan kinerja sehingga dapat menyesuaikan dengan tuntutan profesi yang ada.

Tujuan Supervisi Pendidikan

Supervisi pendidikan mempunyai tujuan dan manfaat yang penting. Di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Membangkitkan dan mendorong semangat guru dan pegawai administrasi sekolah lainnya untuk menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya.
- b. Agar guru dan pegawai administrasi lainnya berusaha melengkapi kekurangan-kekurangan mereka dalam penyelenggaraan pendidikan, termasuk bermacam-macam media instruksional yang diperlukan bagi kelancaran jalannya proses belajar dan mengajar yang baik.
- c. Bersama-sama berusaha mengembangkan, mencari, dan menggunakan metode-metode baru demi kemajuan proses belajar dan mengajar yang baik.
- d. Membina kerja sama yang harmonis antara guru, murid, dan pegawai sekolah. Misalnya, dengan mengadakan seminar, workshop, *in-service*, maupun training.

Empat tujuan supervisi tersebut menjadi target pelaksanaan supervisi.

Sehingga tercipta budaya unggul di sekolah, budaya yang berbasis etos kerja tinggi, kompetisi sportif, kerja sama yang harmonis, dan pelayanan yang kompetitif terhadap *stake holders* lembaga pendidikan. Dengan budaya unggul itu pula, kepuasan publik dapat terwujud

Tujuan supervisi secara umum adalah mengembangkan situasi belajar mengajar yang lebih baik melalui pembinaan dan peningkatan profesi mengajar. Dari sumber lain dijelaskan bahwa tujuan supervisi pendidikan ialah membantu guru mengembangkan profesinya, pribadinya, dan sosialnya, membantu kepala sekolah menyesuaikan program pendidikan dengan kondisi masyarakat setempat, dan ikut berjuang meningkatkan kuantitas dan kualitas lulusan

Adapun tujuan supervisi Menurut Arikunto (2004:40) dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Tujuan Umum

Tujuan umum supervisi adalah memberikan bantuan teknis dan bimbingan kepada guru (dan staf sekolah yang lain) agar personil tersebut mampu meningkatkan

kualitas kerjanya, terutama dalam melaksanakan tugas, yaitu melaksanakan proses pembelajaran.

2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus supervisi meliputi:

- a. Meningkatkan kinerja siswa sekolah dalam perannya sebagai peserta didik yang belajar dengan semangat tinggi, agar dapat mencapai prestasi belajar secara optimal.
- b. Meningkatkan mutu kinerja guru sehingga berhasil membantu dan membimbing siswa mencapai prestasi belajar yang diharapkan.
- c. Meningkatkan keefektifan kurikulum sehingga berdaya guna dan terlaksana dengan baik di dalam proses pembelajaran di sekolah serta mendukung dimilikinya kemampuan pada diri lulusan sesuai dengan tujuan lembaga.
- d. Meningkatkan keefektifan dan keefisienan sarana dan prasarana yang ada untuk dikelola dan dimanfaatkan dengan baik sehingga mampu mengoptimalkan keberhasilan belajar siswa.
- e. Meningkatkan kualitas pengelolaan sekolah, khususnya dalam mendukung terciptanya suasana kinerja yang optimal, yang selanjutnya siswa dapat mencapai prestasi belajar sebagaimana yang diharapkan.
- f. Meningkatkan kualitas situasi umum sekolah sedemikian rupa sehingga tercipta situasi yang tenang dan tentram serta kondusif bagi kehidupan sekolah pada umumnya, khususnya pada kualitas pembelajaran yang menunjukkan keberhasilan lulusan.

Prinsip Supervisi Pendidikan

Menurut Kisbiyanto (2008:10) Supervisi pendidikan mempunyai prinsip-prinsip sebagai aktivitas pembinaan guru, antara lain hendaknya supervisi dilaksanakan secara:

1. Ilmiah (*scientific*) yang berarti harus sistematis yaitu dilaksanakan secara teratur, berprogram dan kontinu, obyektif yaitu berdasar pada data dan informasi, menggunakan instrumen yang dapat memberi data atau informasi sebagai bahan untuk mengadakan penilaian terhadap proses pembelajaran.
2. Demokratis, yaitu menjunjung tinggi asas musyawarah, memiliki jiwa kekeluargaan yang kuat serta sanggup menerima pendapat orang lain.
3. Kooperatif, yaitu mengembangkan usaha bersama untuk menciptakan situasi pembelajaran yang lebih baik.

4. Konstruktif dan kreatif, yaitu membina inisiatif guru serta mendorongnya untuk aktif dalam menciptakan situasi pembelajaran yang lebih baik.

Menurut Suharsimi Arikunto (2004:9), prinsip-prinsip supervisi pendidikan ialah:

1. Supervisi bersifat memberikan bimbingan dan memberikan bantuan kepada guru dan staf sekolah lain untuk mengatasi masalah dan mengatasi kesulitan, dan bukan mencari-cari kesalahan.
2. Pemberian bantuan dan bimbingan dilakukan secara langsung.
3. Apabila pengawas atau kepala sekolah merencanakan akan memberikan saran atau umpan balik, sebaiknya disampaikan sesegera mungkin agar tidak lupa.
4. Kegiatan supervisi sebaiknya dilakukan secara berkala.
5. Suasana yang terjadi selama supervisi berlangsung hendaknya mencerminkan adanya hubungan yang baik antara supervisor dan yang disupervisi.
6. Untuk menjaga agar apa yang dilakukan dan yang ditemukan tidak hilang atau terlupakan, sebaiknya supervisor membuat catatan singkat berisi hal-hal penting yang diperlukan untuk membuat laporan.

Sutisna (dalam Nadhirin 2009:72) mengidentifikasi sembilan prinsip kegiatan supervisi yaitu:

1. Supervisi merupakan bagian integral dari program pendidikan, ia adalah pelayanan yang bersifat kerjasama.
2. Semua guru berhak mendapatkan layanan supervisi.
3. Supervisi hendaknya disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan perseorangan dari personil sekolah.
4. Supervisi hendaknya membantu menjelaskan tujuan dan sasaran pendidikan.
5. Supervisi hendaknya membantu memperbaiki sikap dan hubungan dari semua staf sekolah dan juga supervisi bertujuan untuk menciptakan hubungan antara sekolah dan masyarakat menjadi lebih dekat dan saling memiliki.
6. Tanggung jawab dalam pengembangan supervisi berada pada kepala sekolah dan para penilik atau pengawas di wilayahnya.
7. Harus ada dana yang memadai dalam pelaksanaan program supervisi ini dan dimasukkan ke dalam anggaran tahunan.
8. Efektivitas program supervisi hendaknya mendapatkan laporan yang teradministratif.
9. Supervisi hendaknya membantu menjelaskan dan menerapkan dalam praktek penemuan penelitian pendidikan yang mutakhir.

Fungsi Supervisi Pendidikan

Fungsi supervisi menyangkut bidang kepemimpinan, hubungan kemanusiaan, pembinaan proses kelompok, administrasi personil, dan bidang evaluasi. Pengertian supervisi tersebut, mempertegas bahwa supervisi dilakukan secara intensif kepada guru. Hal ini, secara tidak langsung berdampak pada prestasi belajar siswa. Berpijak pada keterangan ini, maka supervisi pendidikan mempunyai tiga fungsi, yaitu:

1. Sebagai suatu kegiatan untuk meningkatkan mutu pendidikan
2. Sebagai pemicu atau penggerak terjadinya perubahan pada unsur-unsur yang terkait dengan pendidikan
3. Sebagai kegiatan dalam hal memimpin dan membimbing

Menurut Nadhirin, fungsi supervisi yaitu sebagai upaya yang dilakukan oleh supervisor dalam rangka membina para guru agar kualitas proses pembelajaran dan hasilnya meningkat, serta mengupayakan agar guru lebih meningkatkan kinerja sehingga dapat menyesuaikan dengan tuntutan profesi yang ada

supervisi pendidikan bisa mencerahkan dan memperbaiki secara konsisten program lembaga pendidikan sehingga meraih kesuksesan.

Obyek Supervisi Pendidikan

Dalam pelaksanaannya, kegiatan supervisi diarahkan pada pembinaan dan pengembangan aspek-aspek yang berkaitan dengan proses pembelajaran. Guru merupakan komponen yang terlibat langsung dan bertanggung jawab atas proses pembelajaran di kelas, sehingga yang menjadi fokus atau sasaran utama supervisi adalah yang berkaitan dengan guru. Obyek supervisi pendidikan merupakan

sasaran dari pelaksanaan supervisi, yaitu supervisi ditujukan kepada pembinaan personil dan non personil. Supervisi terhadap personil dimaksudkan sebagai upaya melakukan pengawasasn terhadap individu-individu yang terlibat dalam pelaksanaan proses pendidikan, antara lain kepala, guru mata pelajaran, guru kelas, staff usaha, dan tenaga kependidikan lainnya. Supervisi non-personil dimaksudkan sebagai upaya kepengawasan yang dilakukan supervisor terhadap berbagai kesiapan dan kelengkapan sarana dan prasarana sekolah dalam menunjang pelaksanaan proses pendidikan antara lain perpustakaan, administrasi sekolah, ketersediaan buku ajar, program perencanaan pendidikan dan sarana pendidikan lainnya. Obyek sasaran supervisi pendidikan secara lebih mendalam sebenarnya adalah sasaran berupa peningkatan kemampuan guru.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan supervisi diarahkan pada pembinaan dan pengembangan aspek-aspek yang berkaitan dengan proses pembelajaran. Guru merupakan komponen yang terlibat langsung dan bertanggung jawab atas proses pembelajaran di kelas, sehingga yang menjadi fokus atau sasaran utama supervisi adalah yang berkaitan dengan guru.

Pengawasan manajerial dalam konkeks pengawasan pendidikan hendaknya fokus pada kurikulum dan pembelajaran, kesiswaan, sarana prasarana, ketenagaan, keuangan, hubungan masyarakat sekolah dan layanan khusus, selain hal di atas pengawasan manejerial juga hendaknya memperhatikan aspek dasar yang bermuara pada standar isi, standar kompetensi, standar proses, standar sarana dan prasarana, standar pendidik, standar biaya, standar pengelolaan, dan standar penilaian

Supervisi manajerial atau pengawasan manajerial merupakan fungsi supervisi yang berkenaan dengan aspek pengelolaan sekolah yang terkait langsung dengan efisiensi dan efektifitas sekolah yang mencakup perencanaan, koordinasi, pelaksanaan, penilaian, pengembangan sumber daya tenaga pendidik dan kependidikan.

Supervisi adalah suatu aktivitas pembinaan, melihat, menilik dan mengawasi dari atasan yang di rencanakan untuk membantu para Guru dan pegawai sekolah lainnya dalam melakukan pekerjaan secara efektif agar tercapainya tujuan Pendidikan Menurut Ngalim Purwanto (dalam Daryanto,2013:171)

Menurut Permendikbud No. 143 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pengawas Sekolah ini bahwa tugas pokok Pengawas Sekolah adalah melaksanakan tugas pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan yang meliputi :

- a. Penyusunan program
- b. Pelaksanaan pembinaan
- c. Pemantauan pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan
- d. Penilaian, pembimbingan dan pelatihan profesional guru
- e. Evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan dan pelaksanaan tugas pengawasan di daerah khusus.

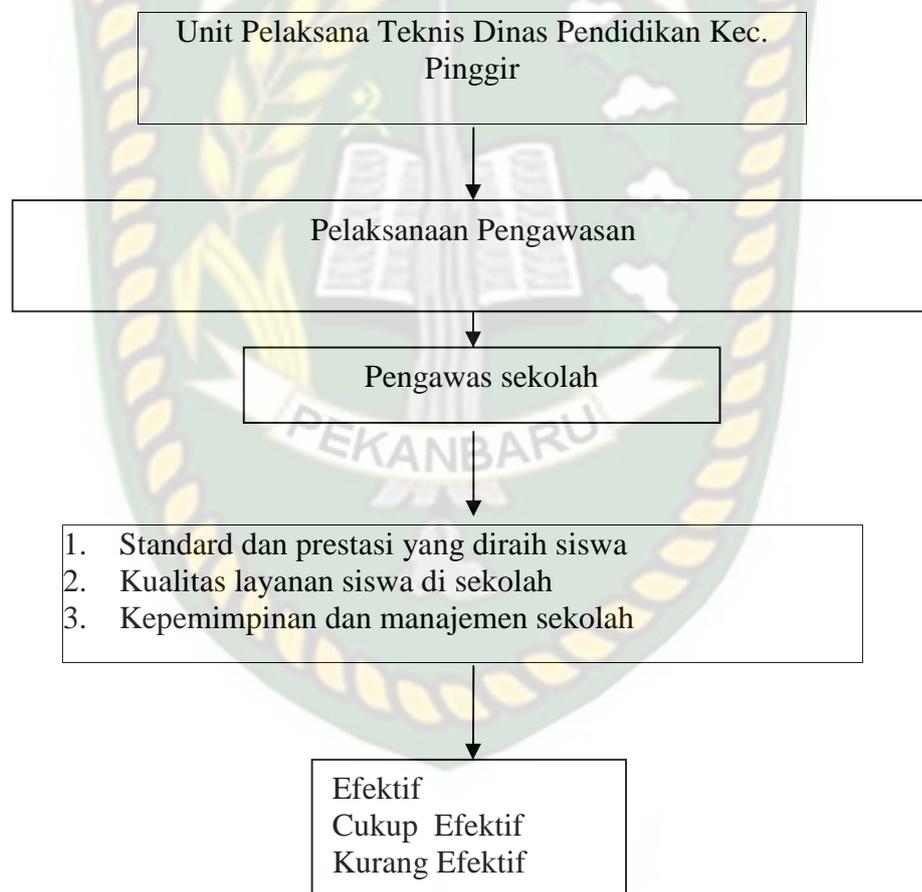
Ofsted (2005,) menyatakan bahwa fokus pengawasan sekolah meliputi: (1) standard dan prestasi yang diraih siswa, (2) kualitas layanan siswa di sekolah (efektifitas belajar mengajar, kualitas program kegiatan sekolah dalam memenuhi kebutuhan dan minat siswa, kualitas bimbingan siswa), serta (3) kepemimpinan dan manajemen sekolah.

Dilihat dari pengertian diatas dapat di simpulkan bahwa yang dimaksud supervisi adalah melihat, menilik, dan mengawasi. Pengertian tersebut merupakan analogi yang mendeskripsikan suatu posisi dimana penglihat lebih tinggi dari objek yang dilihat. Untuk melakukan supervisi di perlukan kelebihan yang dapat melihat dengan tajam terhadap permasalahan peningkatan mutu pendidikan, menggunakan kepekaan untuk memahaminya dan tidak hanya sekedar menggunakan penglihatan mata biasa. Membina peningkatan mutu akademik melalui penciptaan situasi belajar yang lebih baik. Supervisi merupakan suatu proses, artinya suatu rangkaian kegiatan yang berkaiatan dan berurutan, dan menuju ke suatu tujuan tertentu.

B. Kerangka Berfikir

Adapun kerangka berfikir dari penelitian ini mengenai Kerangka pikiran Pelaksanaan Pengawasan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan pada Kualitas Sekolah di Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis (Studi SMA Negeri 3 Pinggir)

Gambar II.I : Kerangka berfikir Pelaksanaan Pengawasan Kualitas Sekolah Oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan di SMA Negeri 3 Pinggir Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis



Sumber : Modifikasi Penulis.

C. Konsep Operasional

Penulis berharap penelitian ini jelas, benar dan terstruktur. Untuk itu di perlukan batasan-batasan dan konsep-konsep yang telah di operasionalkan berkaitan dengan variabel penelitian kesalahan dalm penafsiran dapat di tekan dan di minimalisir sekecil mungkin adapun konsep dan batasan yang terkait dioperasionalkan berkaitan dengan variabel-variabel penelitian sebagai berikut :

1. Administrasi dan Administrasi Publik adalah keseluruhan pelaksanaan dari keputusan-keputusan yang telah di ambil dengan pelaksanaan itu pada umumnya dilakukan dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah di tentukan sebelumnya.
2. Organisasi dan Organisasi Publik merupakan suatu tempat administrasi di jalankan sesuai dengan, fungsi dan tujuan organisasi tersebut.
3. Manajemen dan Manajemen Publik adalah suatu seni atau ilmu yang di gunakan pada organisasi untuk mengukur jalan nya organisasi guna mencapai tujuan yang telah di tetapkan bersama.
4. MSDM adalah proses pendayagunaan manusia sebagai tenaga kerja secara manusiawi
5. Pelaksanaan yang dimaksud disini adalah proses, cara pembuatan, melaksanakan atas keputusan yang telah diberikan dan ditetapkan sebelumnya
6. Pengawasan adalah proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

7. Pengawas sekolah (Supervisi) adalah pejabat fungsional yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis untuk melakukan pengawasan pendidikan terhadap sejumlah sekolah tertentu yang ditunjuk/ditetapkan dalam upaya meningkatkan kualitas proses dan hasil belajar/bimbingan untuk mencapai tujuan pendidikan
8. Standard dan prestasi yang diraih siswa yaitu Menetapkan standar/kriteria pengukuran performansi sekolah yaitu berdasarkan evaluasi diri dari sekolah.
9. Kualitas layanan siswa di sekolah (efektifitas belajar mengajar, kualitas program kegiatan sekolah dalam memenuhi kebutuhan dan minat siswa, kualitas bimbingan siswa),
10. Kepemimpinan dan manajemen sekolah yaitu kepemimpinan yang dilakukan oleh kepala sekolah
11. Melakukan pengembangan sekolah adanya inovasi-inovasi baru untuk melakukan kualitas yang baik
12. Mengadakan kompetisi di sekolah yaitu mengadakan pertandingan atau perlombaan dalam pembelajaran
13. Melakukan proses pembelajaran dengan baik yaitu guru harus melakukan pembelajaran kepada siswa dengan efektif
14. Menggunakan media atau alat peraga adanya media yang di gunakan demi kelancaran proses belajar
15. *Trust*, artinya kegiatan pengawasan dilaksanakan dalam pola hubungan kepercayaan antara pihak sekolah dengan pihak pengawas sekolah sehingga hasil pengawasannya dapat dipercaya

16. *Realistic*, artinya kegiatan pengawasan dan pembinaannya dilaksanakan berdasarkan data eksisting sekolah
17. *Utility*, artinya proses dan hasil pengawasan harus bermuara pada manfaat bagi sekolah untuk mengembangkan mutu dan kinerja sekolah binaannya,
18. *Supporting, Networking* dan *Collaborating*, artinya seluruh aktivitas pengawasan pada hakikatnya merupakan dukungan terhadap upaya sekolah menggalang jejaring kerja sama secara kolaboratif dengan seluruh *stakeholder*
19. *Testable*, artinya hasil pengawasan harus mampu menggambarkan kondisi kebenaran objektif dan siap diuji ulang atau dikonfirmasi pihak manapun.

D. Operasional variabel

Tabel II.1: Pelaksanaan Pengawasan Kualitas Sekolah Oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan di SMA Negeri 3 Pinggir Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis

Konsep	Variabel	Indikator	Item penilaian	Skala
1	2	3	4	5
Supervisi adalah suatu aktivitas pembinaan, melihat, menilik dan mengawasi dari atasan yang di rencanakan untuk membantu para Guru dan pegawai sekolah lainnya dalam melakukan pekerjaan secara efektif agar tercapainya tujuan Pendidikan Menurut Ngalim Purwanto(dalam Daryanto	Pengawasan kualitas sekolah oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan di SMA Negeri 3 Di kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis	1.Standard dan prestasi yang diraih siswa 2.Kualitas layanan siswa di sekolah 3.Kepemimpinan dan manajemen sekolah	a.Melakukan pengembangan sekolah b.Mengadakan kompetisi di sekolah a.Melakukan proses pembelajaran dengan baik b.Menggunakan media atau alat peraga a.Trust b.Realistic c.Utility d.Supporting, Networking dan Collaborating, e.Testable	Efektif Cukup Efektif Kurang Efektif

Sumber : modifikasi Penulis

E. Teknik pengukuran

Untuk mempermudah menganalisis data, maka penelitian terhadap pelaksanaan variabel dan indikator dalam penelitian ini diklasifikasikan dalam 3 (tiga) kategori yaitu, Efektif, Cukup Efektif, Tidak Efektif. Adapun teknik yang digunakan dalam variabel penelitian adalah sebagai berikut

Efektif : Apabila Pengawasan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan pada Kualitas Sekolah di Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis melaksanakan tugas maka di tetapkan indikator berada interval 67%-100%.

Cukup Efektif : Apabila Pengawasan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan pada Kualitas Sekolah di Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis melaksanakan sebagian tugas yang telah di tetapkan indikator, berada pada interval rata-rata 34%-66%.

Kurang Efektif : Apabila Pengawasan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan pada Kualitas Sekolah di Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis tidak melaksanakan tugas yang telah di tetapkan indikator, berada pada interval rata-rata 1%-33%.

Adapun pengukuran indikator sebagai berikut :

1. Standard dan prestasi yang diraih siswa yaitu Menetapkan standar/kriteria pengukuran performansi sekolah (berdasarkan evaluasi diri dari sekolah).

Adalah adanya prestasi yang di dapat kan oleh siswa untuk mutu pendidikan dan menjadikan kualitas yang baik. Adapun yang perlu diakatan:

Efektif : Apabila Pengawasan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan pada Kualitas Sekolah di Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis melaksanakan seluruh tugas yang telah di tetapkan indikator, berada pada interval rata-rata 67%-100%.

Cukup Efektif : Apabila pengawasan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan pada Kualitas Sekolah di Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis sebagian tugas yang telah di tetapkan indikator, berada pada interval rata-rata 34 %-66%.

Kurang Efektif :Apabila Pengawasan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)Pendidikan pada Kualitas Sekolah di Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis tidak melaksanakan tugas yang telah di tetapkan indikator, berada pada interval rata-rata 1%-33%.

2. Kualitas layanan siswa di sekolah (efektifitas belajar mengajar, kualitas program kegiatan sekolah dalam memenuhi kebutuhan dan minat siswa, kualitas bimbingan siswa),Adapun yang perlu dikatakan :

Efektif : Apabila Pengawasan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan pada Kualitas Sekolah di Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis seluruh tugas yang telah ditetapkan indikator, berada pada interval rata-rata 67%-100%.

Cukup Efektif : Apabila pengawasan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan pada Kualitas Sekolah di Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis sebagian tugas pada tugasnya maka di ditetapkan indikator 34 %-66%.

Kurang Efektif : Apabila Pengawasan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan pada Kualitas Sekolah di Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis tidak melaksanakan tugas yang telah ditetapkan indikator, berada pada interval rata-rata 1%-33%

3. Kepemimpinan dan manajemen sekolah yaitu kepemimpinan yang dilakukan oleh pengawas sekolah terhadap sekolah dan manajemen sekolah.

Efektif : Apabila Pengawasan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan pada Kualitas Sekolah di Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis melaksanakan seluruh tugas yang telah ditetapkan indikator, berada pada interval rata-rata 67%-100%.

Cukup Efektif : Apabila Pengawasan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan pada Kualitas Sekolah di Kecamatan Pinggir

Kabupaten Bengkalis melaksanakan sebagian tugas yang telah ditetapkan indikator, berada pada interval rata-rata 34 %-66%.

Kurang Efektif : Apabila Pengawasan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan pada Kualitas Sekolah di Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis tidak melaksanakan tugas yang telah ditetapkan indikator, berada pada interval rata-rata 1%-33%.

